

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PASCA COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR

Oemmy Ramadhany^{1(a)}, Bethra Ariestha^{2(b)}, Asropi^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta
^{a)}oemmy.2342021054@stialan.ac.id, ^{b)}bethra.2342021058@stialan.ac.id, ^{c)}asropi@stialan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

28-11-2023

Diterbitkan Online:

01-11-2024

Kata Kunci:

Pemerintahan Kolaboratif,
Pengembangan, UMKM

Keywords:

Collaborative Governance,
Development, UMKM

Corresponding Author:

oemmy.ramadhany@gmail.com

ABSTRAK

Struktur usaha di Kabupaten Bogor menurut data *Online Single Submission* (OSS), didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini seharusnya memberikan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Barat. Namun demikian, kontribusi UMKM di Kabupaten Bogor terhadap PDRB masih lebih rendah dibandingkan kontribusi UMKM di Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang, yang memiliki jumlah UMKM lebih sedikit dari Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kerjasama tradisional yang telah dilakukan serta merencanakan strategi tindakan kolaborasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena yang ada pada subjek penelitian yaitu strategi *collaborative governance* UMKM Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi literatur. Adapun temuan dari penelitian ini adalah belum adanya evaluasi terkait efektivitas bentuk kerjasama tradisional dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor. *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM Pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor ini dapat dilakukan melalui pendekatan tahapan Ansell & Gash yang melibatkan *stakeholder* pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi.

ABSTRACT

The business structure in Bogor Regency, according to Online Single Submission (OSS) data, is dominated by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This should provide quite a large opportunity to increase the contribution of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in West Java. However, the contribution of MSMEs in Bogor Regency to GRDP is still lower than the contribution of MSMEs in Bekasi Regency, Bandung City, and Karawang Regency, which have fewer MSMEs than Bogor Regency. This research aims to identify traditional collaborations that have been carried out and plan collaborative action strategies that can be implemented by the Bogor Regency Government. The research method used by the author is a qualitative approach. The qualitative approach places more emphasis on observing phenomena that exist in the research subject, namely the collaborative governance strategy of Bogor Regency MSMEs. Data was collected through in-depth interviews and literature studies. The findings from this research are that there has been no evaluation regarding the effectiveness of traditional forms of cooperation in developing MSMEs in Bogor Regency. Collaborative governance in the development of post-COVID-19 MSMEs in Bogor Regency can be carried out through the Ansell & Gash stage approach, which involves government, private, community, and academic stakeholders.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.906>

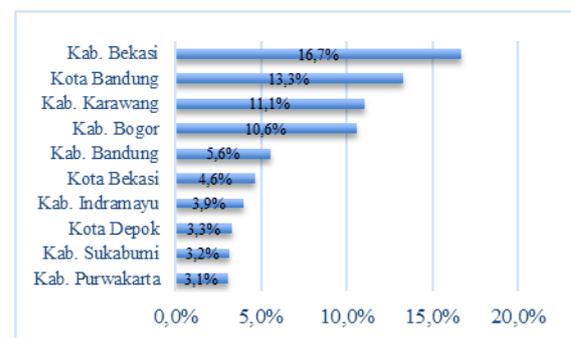
PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berfungsi sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu negara (Li & Pang, 2023). Selain itu, penelitian berbagai negara menunjukkan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam keberhasilan ekonomi suatu negara (Bouwman et al., 2018). Sektor ini merupakan pusat ekonomi, yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Hidayat A, 2022; Paramita Hapsari et al., 2014; Putra, 2016; Putri & Kartolo, 2019). Hal ini terbukti pada saat krisis keuangan pada tahun 1998 dan pada masa Pandemi Covid-19, UMKM bisa menghadapinya lebih baik daripada Usaha Besar (Suminah et al., 2022). Hal ini didukung oleh tingkat fleksibilitas yang dimiliki UMKM lebih besar dibandingkan dengan Usaha Besar sehingga UMKM bisa lebih cepat dan fleksibel dalam merespon persoalan yang terjadi secara tiba-tiba (Berry et al., 2001).

Krisis moneter yang terjadi pada rentang tahun 1997-1998 memberikan dampak negatif bagi sektor perindustrian (BPS, 1999). Industri besar dan sedang berkurang drastis dari 22.997 perusahaan pada tahun 1996 menjadi 22.422 perusahaan tahun 1998. Jumlah industri besar dan sedang menurun 2,5 persen dari tahun 1996. Jumlah tenaga kerja pada periode tersebut juga mengalami penurunan hingga 16,1 persen atau 679 ribu orang. Jumlah Industri kecil dan rumah tangga cukup banyak dibandingkan dengan industri besar dan sedang. Industri kecil dan rumah tangga pada tahun 1997 tercatat mengalami kenaikan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5,3 persen dan 4,9 persen dari tahun sebelumnya.

Kondisi yang sama kembali terulang saat Pandemi Covid-19, pandemi telah berdampak besar pada penurunan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada penurunan kondisi ekonomi dunia (McKibbin & Fernando, 2023; Takyi et al., 2023) dan Indonesia (Suminah et al., 2022). Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,07 persen di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar (19,88 persen) PDB di tahun 2020 mengalami kontraksi terbesar, yaitu sebesar 2,93 persen (BPS, 2022). Dampak

pandemi terhadap bisnis UMKM menurut Bappenas (2020) adalah berkurangnya pesanan/ permintaan terhadap produk sehingga terjadi penurunan pendapatan yang menjadi salah satu penyebab utama masalah keuangan terutama untuk pengeluaran berjenis tetap (*non variabel*). Salah satu tanda-tanda melemahnya ekonomi suatu negara adalah penurunan kemampuan masyarakat dan daya beli mereka (Indayani & Hartono, 2020).



Gambar 1. Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Barat

Sumber: BPS Jawa Barat (Data diolah), 2021

Struktur usaha di Kabupaten Bogor menurut data *Online Single Submission* (OSS), didominasi oleh UMKM, hal ini seharusnya memberikan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Barat. Berdasarkan *Open Data Jabar*, Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama kabupaten/ kota dalam jumlah UMKM di Jawa Barat. Saat ini, UMKM Kabupaten Bogor belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PDRB sehingga tidak menjadikan Kabupaten Bogor termasuk tiga besar kabupaten/ kota yang memiliki kontribusi PDRB di Jawa Barat. Pada grafik 1 terlihat kontribusi PDRB Kabupaten Bogor tahun 2021 sebesar 10,6 persen. Presentase ini lebih kecil dari Kabupaten Karawang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bekasi yang memiliki jumlah UMKM lebih sedikit dari Kabupaten Bogor (BPS Provinsi Jawa Barat, 2023). Nilai tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara potensi wilayah dan jumlah pelaku usaha yang ada. Kondisi ini mengakibatkan nilai tambah yang dihasilkan dari pelaku usaha masih rendah.

Sektor industri pengolahan menyumbang PDRB terbesar, yaitu 53,53 persen pada tahun 2021 dari total 14 sektor usaha (BPS Kabupaten Bogor, 2023). Menurut data BPS, 33,91 persen pelaku usaha di industri pengolahan telah mengurangi kapasitas *output* karena adanya pengurangan jam kerja, mesin dan personal selama Pandemi Covid-19, 67,77 persen perusahaan berskala UMK mengalami penurunan pendapatan di triwulan III 2020. Sebagian besar UMKM terpaksa menutup kegiatan operasionalnya selama Pandemi Covid-19. Menurut Lutfi et al., (2020), penurunan permintaan terhadap produk UMKM menunjukkan dampak dari kebijakan pembatasan sosial saat Pandemi Covid-19. Berbagai program terkait UMKM dalam mendorong pembentukan UMKM yang tangguh, mandiri, berbasis pengetahuan dan teknologi telah dilakukan oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi, praktisi dan media (Rinaldo et al., 2023).

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro difokuskan pada langkah-langkah konkret yang meningkatkan kapasitas UMKM. Pertama, pelatihan dan pendidikan bertujuan meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam produksi, manajemen, dan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, pembinaan manajemen usaha melalui pendampingan intensif memastikan pengelolaan keuangan dan operasional yang efisien, sehingga pelaku usaha dapat menghadapi dinamika pasar. Selanjutnya, peningkatan akses pasar dilakukan dengan memfasilitasi koneksi bisnis UMKM ke pasar domestik dan internasional melalui platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Penguatan permodalan tidak hanya melalui akses kredit, tetapi juga dengan inovasi pembiayaan alternatif seperti pendanaan bersama dan kerjasama investor guna meningkatkan daya saing. Terakhir, penguatan organisasi dilakukan dengan membentuk asosiasi pelaku usaha untuk mendorong kolaborasi yang efektif dalam menghadapi tantangan industri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai upaya untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, termasuk membantu UMKM untuk menghasilkan produk, membina mereka, memberikan bimbingan dan pelatihan teknis (Kabupaten Bogor, 2023). Selain itu kemudahan dalam

pembuatan perizinan usaha, dianggap menjadi salah satu stimulus bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan membuat legalitas usahanya.

Penyederhanaan perizinan berusaha sebagai bentuk reformasi birokrasi, melalui pendekatan tingkat resiko terhadap jenis usaha atau kegiatan yang akan dilakukan. Permohonan perizinan berbasis resiko yang dilakukan secara daring melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi. Kemudahan ini dapat mendorong pelaku usaha khususnya sektor UMKM untuk melegalisasi kegiatan usahanya (Peraturan Pemerintah, 2021). Sejak diluncurkannya *OSS RBA* pada bulan Agustus 2021, terlihat adanya peningkatan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan. Dari tabel 1 ada peningkatan signifikan khususnya untuk UMKM. Data pada tahun 2021, berjumlah 3.261 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha dengan persentase sebesar 28 persen dari total jumlah pelaku usaha sejak tahun 2019 s.d tahun 2022. Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin usaha terus mengalami kenaikan cukup signifikan sampai dengan tahun 2022 mencapai angka 7.443 izin usaha. UMKM mendominasi sebesar 96,07 persen dari total pelaku usaha di Kabupaten Bogor yaitu 11.209 UMKM.

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha di Kabupaten Bogor

Tahun	UMKM	Usaha Besar	Total	%
2019	343	235	578	5,0%
2020	314	71	385	3,3%
2021	3.210	51	3.261	28,0%
2022	7.342	101	7.443	63,8%
Total Usaha	11.209	458	11.667	100%

Sumbe : OSS RBA (Data diolah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Bogor, termasuk keterbatasan manajemen (El & Azra, 2023; Nurhasan & B, 2023), keterbatasan teknologi dan informasi (Adi Utomo & Hanum, 2023), keterbatasan permodalan (Deviyanti et al., 2023), keterbatasan kualitas produksi (Rahmadani, 2023), dan keterbatasan pemasaran produk (Adi Utomo & Hanum, 2023; Harini et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian (Suyadi et al., 2018) menunjukkan bahwa dua tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah

keterbatasan dalam manajemen/ pengelolaan usaha serta ketakutan terhadap resiko yang dapat ditimbulkan. Selain itu, kurangnya pembinaan dan keterlibatan instansi terkait dianggap sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan usaha. Hasil penelitian (Mutiarawati & Sudarmo, 2021) menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dihambat oleh beberapa faktor, seperti ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan akibat perbedaan cara pandang, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, keterbatasan sumber daya keuangan, serta kurangnya sumber daya manusia dan teknis yang mendukung efektivitas kolaborasi.

Terbentuknya kesamaan pandangan para pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pendorong terciptanya keberhasilan *collaborative governance*. Tiap aktor *stakeholder* pemangku kepentingan mengupayakan terciptanya kondisi kolaborasi yang saling memahami dalam berbagai situasi di mana para pemangku kepentingan saling berinteraksi. Difasilitasi berbagai instrument dari beraneka ragam *platform* layanan yang tersedia adalah salah satu cara *stakeholder* menjaga komunikasi antara satu sama lain (Nur et al., 2022). Dalam konteks *collaborative governance*, klasifikasi tujuan, pengukuran hasil, dan implementasi reformasi melibatkan keterkaitan antar institusi yang bekerja sama. Inisiatif yang diambil oleh masing-masing institusi atau pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam memahami konsep *collaborative governance* itu sendiri, yang menekankan pada kerjasama dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Silayart et al., 2021).

Titik awal proses *collaborative governance* yang baik berangkat dari sebuah masalah yang sesuai dan memiliki manfaat. Dua kondisi utama penyebab lahirnya kolaborasi, yaitu : 1) dengan membuat sebuah kelompok kerja agar sebuah masalah dapat diusahakan untuk diinvestasikan bersama-sama, 2) adanya argument yang patut untuk dipercaya perihal terdapatnya kesanggupan dan pengaruh dari aktor-aktor yang terlibat di dalam organisasi secara menonjol memiliki kapasitas energi yang lebih dalam mewujudkan ide serta gagasan dari *collaborative governance* (Utami & Pancasilawan, 2017).

Tingkat keberhasilan maupun kegagalan *collaborative governance* sangat di tentukan oleh aspek komitmen *stakeholders*. Ancaman

kegagalan kolaborasi berhubungan dengan rendahnya komitmen dari tingkat pusat. Kecenderungan partisipasi dari aktor lain sangat dipengaruhi dari sejauh apa komitmen kuat pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan terlebih yang berada pada pengambil ke bijakan di tingkat pusat pemerintahan (Hendro Pratikno & Anwar Kurniadi, 2021). Visi dan misi yang diangkat oleh kepala daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menunjukkan gambaran komitmen pemerintah dalam pengembangan ekonomi, salah satunya terkait dalam pengembangan UMKM. Komitmen *stakeholders* terkait upaya pengembangan ekonomi sebagaimana dijabarkan dalam misi pembangunan yang harus berorientasi dan menempatkan masyarakat sebagai sasaran utama dari target pembangunan ekonomi (Hariyoko, 2018).

Model/ Relasi *collaborative governance* yang terbentuk antara pemerintah, pelaku ekonomi dalam hal ini pihak swasta, dan masyarakat binaan khususnya adalah para usahawan yang bergerak di bidang UMKM terjalin melalui hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah mengambil peran dalam hal fasilitasi pelaku usaha dalam industri UMKM untuk memperoleh akses bimbingan intensif dari perusahaan industri menengah dan/atau besar. Bentuk pembinaan bisa berbentuk bantuan dana hibah/ bergulir atau dapat berupa kemudahan dan dorongan dalam memasarkan produk yang telah di produksi oleh pelaku usaha di bidang UMKM. Dalam hal modernisasi bisnis atau usaha, pelaku sektor UMKM melalui lembaga keuangan bisa memperoleh mendapatkan bantuan dana tambahan modal usaha (Septa Rinawati & Sri Sadewo, 2019).

Selain itu bentuk nyata dukungan kepada UMKM dan sebagai penerapan dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dorongan bagi UMKM, agar barang/jasa hasil produksi pelaku UMKM bisa dipasarkan diluar daerah dan semakin berkembang tidak hanya dipasarkan di pasar lokal. Hal ini dapat terwujud melalui fasilitasi dan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pemasaran produk secara digital sehingga tidak lagi ada hambatan terkait batas tempat dan waktu pemasaran produk (Putra, 2016).

Penerapan Model/ Relasi *collaborative governance* pada penelitian Intikaroh (2011)

yakni bahwa dalam pengembangan pengelolaan UMKM melalui proses sebagai berikut:

1. Pertama kali para pemangku kepentingan bertemu dalam suatu forum, seperti Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dan Musrenbangcab (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan), atau dalam forum lain yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
2. Desain model kelembagaan yang digunakan dalam kolaborasi pengelolaan UMKM ini membagi tanggung jawab antar pemangku kepentingan atau *stakeholder* berdasarkan fungsi utama masing-masing pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Di era revolusi industri 4.0 dalam konteks *collaborative governance* terbentuknya *trust building* melalui proses interaksi yang dilakukan secara intens. *Trust building* terbentuk dengan cara diskusi, koordinasi antar *stakeholders*, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, sosialisasi antara pelaku UMKM sendiri, pemerintah (perangkat daerah), organisasi swasta (perusahaan) dan aktor-aktor yang berasal dari masyarakat (asosiasi-asosiasi atau komunitas). Setelah rencana kegiatan dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pemasaran produknya yang dirumuskan oleh para *stakeholder* dapat direalisasikan dan memberikan dampak yang besar bagi UMKM, kondisi ini akan memperkuat *trust building* (Faidati & Muthmainah, 2019).

Dalam *collaborative governance*, pemangku kepentingan memastikan bahwa kepentingan masing-masing instansi diprioritaskan untuk mencapai tujuan bersama, hal ini menjadi bagian dari proses pengembangan UMKM. *Collaborative governance* menjadi instrumen penting untuk menilai berhasil tidaknya proses dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Bogor. Tujuan pengembangan UMKM ini sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 yaitu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dengan cara menghasilkan barang/ jasa yang kualitasnya sesuai dengan ekspektasi dari konsumen (Pieter & Utomo, 2023). Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk, lapangan kerja, ekspor serta meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih topik ini karena belum pernah diteliti

sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan pada strategi *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor. Penelitian ini akan mengidentifikasi kerjasama tradisional yang telah dilakukan serta merencanakan strategi tindakan kolaborasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif tidak memerlukan penggunaan alat statistik (Ali & Yusof, 2011). Namun, metode kualitatif lebih menekankan pada mengamati fenomena yang ada di subjek penelitian. Basri (2014) menyatakan bahwa inti dari penelitian kualitatif adalah prosesnya dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya.

Data penelitian diperoleh dari sumber informasi primer dan sekunder. Sumber primer untuk penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber kunci selama penelitian lapangan berlangsung yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Mikro dan Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, dan pelaku UMKM binaan Kabupaten Bogor yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi terkait kondisi UMKM di Kabupaten Bogor dari berbagai sudut pandang.

Data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen dan arsip lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen dan arsip yang diperoleh diantaranya data dari Bappenas terkait kebijakan UMKM, BPS, dan OSS RBA perihal data statistik, Peraturan Pemerintah mengenai perizinan berusaha, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor mengenai pemberdayaan UMKM, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor, Rencana Strategis DiskopUKM dan Disperdagin. Studi literatur yang diperoleh dari artikel dan buku mengenai tata kelola dan perkembangan UMKM dan *collaborative governance*.

Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) digunakan sebagai metode analisis data. Menurut perspektif ini,

ada tiga tahap dalam prosedur analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data kualitatif disajikan dalam data yang berupa kata-kata dan bukan serangkaian angka. Data diperoleh dengan mengumpulkan catatan lapangan, hasil wawancara, dan bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Agar data hasil temuan dapat dengan mudah diinformasikan kepada orang lain. Kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas digunakan untuk mengolah analisis kualitatif data. Penyajian data dilakukan dengan terperinci dan mudah dipelajari untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerjasama Tradisional

Outcome dan *impact* yang lebih baik dari program yang dilakukan adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai sebagai nilai yang ingin dicapai dari tujuan sasaran strategis pengembangan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sektor nasional pengembangan UMKM menjabarkannya melalui arah pencapaian, maksud dari kebijakan, dan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024. Hal yang ingin dicapai yakni terwujudnya model koperasi baru yang terdepan dan modern. Selanjutnya terciptanya UMKM yang dapat bersaing di pasar dalam negeri dan mancanegara. Serta mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran dan indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024 sejalan dengan misi keempat Provinsi Jawa Barat yaitu “meningkatkan produktivitas & daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan”. Pada tingkat Kabupaten Bogor hal ini tertuang dalam misi kedua Kabupaten Bogor yaitu “mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan” untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”.

Bentuk implementasi dari visi misi tersebut salah satunya dengan program *UMKM Go Digital*. Melalui program *UMKM Go Digital* pelaku usaha bisa memasarkan produknya kemasyarakat dengan mudah tanpa batas ruang dan waktu dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain melalui program digitalisasi pemasaran UMKM, pemerintah Kabupaten

Bogor juga memfasilitasi pemasaran UMKM dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan/event diantaranya “Gebyar Temu 1001 UMKM”. Event ini diselenggarakan dalam rangka memotivasi semangat bisnis pelaku UMKM dan sebagai ajang pemasaran produk UMKM di Kabupaten Bogor. UMKM Kabupaten Bogor terkonsentrasi pada kategori industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka pengembangan UMKM, contohnya kolaborasi antara DiskopUKM Kabupaten Bogor dengan PT.Angkasa Pura II. Pemerintah Kabupaten Bogor memfasilitasi UMKM di Kabupaten Bogor untuk mendapatkan kesempatan ikut serta pada event yang diselenggarakan oleh PT.Angkasa Pura II salah satunya pada “*Event Traveling Fest tahun 2022*” di Terminal 3 Kedatangan Domestik International Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 44 (empat puluh empat) UMKM lolos kurasi oleh PT.Angkasa Pura II mengikuti event tersebut. Event ini berlangsung selama 5 (lima) hari dengan omset penjualan sebesar Rp.20.675.000 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kolaborasi ini terus berlanjut dimana PT.Angkasa Pura II memberikan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp.793.000.00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada 11 UMKM Kabupaten Bogor dan otomatis menjadi Mitra Binaan PT.Angkasa Pura II. Keikutsertaan UMKM Kabupaten Bogor terus berlanjut pada event-event yang dilaksanakan oleh PT.Angkasa Pura II. Pada “*Event SME Creative Festival*”, PT.Angkasa Pura II memfasilitasi lokasi, *stand booth*, kursi, serta listrik yang dapat digunakan selama acara berlangsung tanpa membayar. Hal ini dikarenakan kolaborasi yang telah terjalin baik antara DiskopUKM Kabupaten Bogor dengan PT.Angkasa Pura II.

Strategi *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor selain dengan PT.Angkasa Pura 2, juga dilakukan dengan pihak swasta lainnya seperti kolaborasi dengan PT. Fast Retailing Indonesia (Uniqlo) dan PT. IKEA Teras Indonesia. *Collaborative Governance* dengan industri retail besar yang memiliki gerai/ unit usaha di Kabupaten Bogor dilakukan sebagai upaya agar

produk-produk UMKM Kabupaten Bogor dapat masuk dan bersaing di pasar retail modern.

DiskopUKM dan Disperdagin juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan akademik sebagai narasumber diberbagai kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan non teknis pelaku UMKM. Selain itu kerjasama dalam akses permodalan juga dilakukan oleh DiskopUKM dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yaitu BPD Jabar Banten, CSR dari BUMN, dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk keringanan biaya (administrasi dan bunga), subsidi, dan alat.

Berdasarkan hasil temuan data dilapangan dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya bentuk kerjasama tradisional dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor.

Strategi *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM

Praktek kolaborasi pengelolaan UMKM di Kabupaten Bogor dapat dilakukan antara pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan UMKM. Namun, kolaborasi ini tidak terjadi secara langsung, melainkan bekerja sama dengan cara melakukan tugas dan fungsi pokok pemangku kepentingan.

Stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi yaitu:

- a. DiskopUKM Kabupaten Bogor memiliki peranan pada pemberdayaan penguatan kelembagaan dan perlindungan usaha mikro. Pemberdayaan tersebut berupa memberikan pengembangan dan peningkatan kualitas kemasan, tampilan desain, teknologi produk serta promosi akses pasar produk usaha mikro.
- b. Disperdagin Kabupaten Bogor memiliki peranan untuk pemberdayaan UMKM khususnya pada sektor industri pengolahan. Pemberdayaan UMKM tersebut bertujuan untuk mewujudkan daya saing perindustrian daerah dengan meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- c. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bogor memiliki peranan untuk mendorong para pengrajin yang mayoritasnya kaum Wanita untuk terus bekerja dan menghasilkan produk terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan kelompok serta keluarga pelaku UMKM.

- d. Forum UMKM per kecamatan di Kabupaten Bogor yang menjembatani kegiatan-kegiatan UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Forum UMKM sebagai ujung tombak yang bertugas mendiagnosa, memeriksa, mendata, menginventarisasi UMKM yang ada di setiap kecamatan.
- e. Akademisi yang bekerjasama dengan DiskopUKM diantaranya Universitas Djuanda (UNIDA) dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Peran akademisi sebagai narasumber pada berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM seperti pelatihan dan penampingan inovasi produk, pemasaran digital, keuangan digital, pengembangan teknis dan jangkauan pemasaran produk UMKM, dan pelatihan tata kelola keuangan,
- f. Lembaga keuangan BPD Jabar Banten yang berperan dalam memberikan kemudahan akses permodalan untuk UMKM.

Terdapat enam kriteria penting untuk terciptanya kolaborasi dalam pandangan *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yaitu : 1) lembaga publik atau lembaga memprakarsai terciptanya forum *collaborative*, 2) termasuk aktor *nonstate* yang meliputi anggota dalam forum, 3) Anggota terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya "dikonsultasikan" oleh lembaga publik, 4) forum secara resmi mengatur pertemuan yang diatur dan dilakukan secara kolektif antara anggota, 5) forum ini bertujuan untuk mencapai konsensus (meskipun dalam praktik konsensus tidak tercapai), dan 6) kebijakan publik atau manajemen menjadi fokus kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).

Kolaborasi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor memiliki peluang untuk dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, diantaranya DiskopUKM, Disperdagin, Forum UMKM, Akademisi (UNIDA dan UIKA) serta lembaga keuangan (BPD Jabar Banten). Kolaborasi tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM yang akan berimplikasi kepada meningkatnya PDRB Kabupaten Bogor.

Proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor menurut Ansell dan Gash dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, berkomitmen

pada proses, saling memahami, dan menjalankan program (Ansell & Gash, 2008).

Hasil penelitian dan pengkajian terhadap kelima tahapan proses *collaborative governance* tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebagai proses menyatukan kepentingan masing-masing *stakeholder* dengan cara melakukan identifikasi peluang dan keuntungan bersama dalam kolaborasi. Pada proses kolaborasi pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor, pemerintah perlu melakukan upaya dialog bersama yang melibatkan beberapa *stakeholder* yaitu : DiskopUKM, Disperdagin, Forum UMKM, Akademisi (UNIDA dan UIKA) dan BPD Jabar Banten. Dialog tersebut menghasilkan beberapa program dan ide-ide yang dapat mengembangkan UMKM di Kabupaten Bogor.

Misalnya DiskopUKM dan Disperdagin melakukan persiapan untuk membuat sentra UMKM untuk sektor industri makanan, pihak akademisi terlibat dalam proses kajian pembuatan sentra tersebut dengan melakukan penelitian terkait kondisi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempersiapkan UMKM tersebut. Dialog dapat dilakukan melalui forum UMKM di setiap kecamatan. BPD Jabar Banten memberikan kemudahan akses permodalan secara berkelompok untuk UMKM yang terlibat pada sentra tersebut melalui fasilitas BJB Mesra.

2. Membangun kepercayaan

Kunci keberhasilan dari proses kolaborasi dengan membangun kepercayaan diantara *stakeholder*. Contoh *collaborative governance* yaitu pada saat rencana pembangunan sentra UMKM, masing-masing *stakeholder* sanggup untuk melakukan tugas sesuai dengan peranannya yaitu peran dalam pengambil keputusan (DiskopUKM), peran dalam kepemimpinan (Disperdagin), peran dalam komunikasi (Forum UMKM), peran dalam pengembangan sumber daya manusia (Akademisi), dan peran dukungan permodalan berusaha (BPD Jabar Banten).

3. Berkomitmen pada proses kolaborasi

Komitmen *stakeholder* ditunjukkan dengan bukti bahwa pada *stakeholder* bersedia

melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan peran masing-masing. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Kabupaten Bogor melalui DiskopUKM dan Disperdagin bersedia memfasilitasi kebutuhan dalam pembentukan sentra UMKM.

4. Saling memahami

Pelaksanaan *collaborative governance* antara DiskopUKM, Disperdagin, Akdemisi (UIKA dan UNIDA) serta BPD Jabar Banten adalah menjalankan langkah strategis untuk mencapai tujuan bersama untuk pengembangan UMKM Kabupaten Bogor. Contoh *collaborative governance*, pembentukan sentra UMKM menjadi agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor yang membutuhkan keterlibatan dari semua *stakeholder*. Setiap *stakeholder* memahami peranan dan tugasnya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar *stakeholder*.

5. Menjalankan program

Pengembangan UMKM Kabupaten Bogor yang optimal adalah tujuan dari proses *collaborative governance* ini. Salah satu contohnya dengan membangun sentra IKM.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM Pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor ini dilakukan melalui pendekatan tahapan Ansell & Gash (2008) yang melibatkan *stakeholder* pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi. Peran pemerintah dengan menerbitkan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor. Swasta berperan membantu UMKM dengan memberikan sarana pemasaran, pengembangan, dan perluasan jejaring UMKM, serta pembiayaan, hibah dan pembiayaan lainnya. Masyarakat melalui forum UMKM berperan menjembatani kegiatan-kegiatan UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Akademisi berperan dalam merumuskan strategi-strategi pengembangan jangka panjang dan pengukuran indikator keberhasilan dari program *collaborative governance* berbasis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Utomo, N., & Hanum, N. (2023). *Strategi Penguatan Digital Marketing Produk*

- Lokal Di Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. 4(1), 103.
- Ali, A. Md., & Yusof, H. (2011). *Quality in Qualitative Studies The Case of Validity*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bappenas. (2020). *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM*.
- Basri, H. (2014). *Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda*. <https://doi.org/10.17265/1548-6591>
- Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2001). Small and medium enterprise dynamics in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(3), 363–384. <https://doi.org/10.1080/00074910152669181>
- Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo, F. J., & De Reuver, M. (2018). *The impact of digitalization on business models*. <https://doi.org/10.1108/DPRG-07-2017-0039>
- BPS. (1999). *Statistik Indonesia 1998*. <https://www.bps.go.id/publication/1999/05/15/286f7f761890bf7c52fd9fe8/statistik-indonesia-1998.html>
- BPS. (2022). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/04/a6375ea4a72374e3bedd0b00/profil-industri-mikro-dan-kecil-2020.html>
- BPS Kabupaten Bogor. (2023). *PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2020-2022*. <https://bogorkab.bps.go.id/indicator/52/345/1/pdrb-atas-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-.html>
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2023). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Milyar Rupiah)*. [https://jabar.bps.go.id/indicator/155/101/1/seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-](https://jabar.bps.go.id/indicator/155/101/1/seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-provinsi-jawa-barat.html)
- menurut-kabupaten-kota-provinsi-jawa-barat.html
- Deviyanti, V., Hajar, S., & Sasoko, D. M. (2023). Studi Deskriptif Pendapatan Pedagang Usaha Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Volume 22 Nomor 2 Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)*:
- El, F., & Azra, A. (2023). *Peningkatan Kapasitas Kompetensi Umkm Dengan Pelatihan Penyusunan Proposal Usaha Di Desa Cibitung Kulon Kabupaten Bogor*. 7(3).
- Faidati, N., & Muthmainah, N. F. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri*.
- Harini, S., Saputra, H., Hodailma, A., Ningsih, K. F., Djuanda, U., Tol, J., No, C., & Bogor, K. (2023). Optimalisasi Digital Marketing Pada Umkm Peci Assagofah Di Desa Banjarwangi Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1).
- Hariyoko, Y. (2018). *Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban*.
- Hendro Pratikno, & Anwar Kurniadi. (2021). Kolaboratif Pengelolaan Candi Borobudur Dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi. *Edukasi IPS*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21009/eips.005.1.01>
- Hidayat A, L. S. L. Z. (2022). *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2). <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Kabupaten Bogor. (2023). *Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024*.
- Li, W., & Pang, W. (2023). *Digital inclusive finance, financial mismatch and the innovation capacity of small and medium-sized enterprises: Evidence from Chinese listed companies*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13792>

- Lutfi, M., Buntuang, P. C. D., Kornelius, Y., Erdiyansyah, & Hasanuddin, B. (2020). The impact of social distancing policy on small and medium-sized enterprises (SMEs) in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 18(3), 492–503. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(3\).2020.40](https://doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.40)
- McKibbin, W., & Fernando, R. (2023). The global economic impacts of the COVID-19 pandemic. *Economic Modelling*, 129, 106551. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106551>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan. 2021.
- Nur, M. I., Juana, T., Ningrum, E. W., & Sutisna, S. (2022). Kolaborasi Governansi Dalam Program Umkm Juara Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Jawa Barat. *AdBispreneur*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.35196>
- Nurhasan, N., & B, R. S. (2023). Analisis Pembukuan Sederhana terhadap Pengelolaan Cashflow UMKM di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 273. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.978>
- Paramita Hapsari, P., Hakim, A., & Soeaidy, S. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)*. 17(2).
- Peraturan Pemerintah. (2021). *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*.
- Perda Kab bogor. (2019). *Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro*.
- Pieter, L. A. G., & Utomo, M. M. B. (2023). Performance and development challenges of micro–small bamboo enterprises in Gunungkidul, Indonesia. *Advances in Bamboo Science*, 4, 100037. <https://doi.org/10.1016/j.bamboo.2023.100037>
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. In *Artikel Jurnal Analisa Sosiologi Oktober* (Vol. 2016, Issue 2).
- Rahmadani, R. M. Y. S. A. R. W. A. (2023). *Peningkatan Pemahaman dan Perhitungan Produksi Pada UMKM Di Desa Pasir, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor*.
- Rinaldo, D., Sari, P. A., Sari, W. P., & Miharja, R. (2023). *The Development of Good Micro , Small and Medium Enterprises Governance Indicators*. 22(1), 93–118.
- Septa Rinawati, H., & Sri Sadewo, F. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77>
- Silayart, K., Sartika, I., & Mulyati, D. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula*. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Suminah, S., Suwanto, S., Sugihardjo, S., Anantanyu, S., & Padmaningrum, D. (2022). *Determinants of micro, small, and medium-scale enterprise performers' income during the Covid-19 pandemic era*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09875>
- Suyadi, ;, Syahdanur, ;, & Suryani, S. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Takyi, P. O., Dramani, J. B., Akosah, N. K., & Aawaar, G. (2023). Economic activities' response to the COVID-19 pandemic in developing countries. *Scientific African*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01642>
- Utami, S. B., & Pancasilawan, R. (2017). *Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat*.